

KEADILAN FISKAL DAN EKUITAS SOSIAL: PILAR DAYA SAING EKONOMI MAKRO PERDAGANGAN INTERNASIONAL

FISCAL JUSTICE AND SOCIAL EQUITY: PILLARS OF INTERNATIONAL TRADE MACROECONOMIC COMPETITIVENESS

Siti Sofiaturohmah¹, Muhammad Rifki Rosman², Andi Kasman³

¹² Graduate School of Government Science, Faculty of Social and Political Science, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia.

³ Government Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Siti19044@mail.unpad.ac.id, muhammad24318@mail.unpad.ac.id, dr.andi@unpad.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan fiskal dan kesetaraan sosial dalam kebijakan fiskal di Indonesia serta implikasinya terhadap daya saing nasional di arena perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian terkait, dan literatur akademik. Sampel data meliputi dokumen kebijakan fiskal, laporan ekonomi, dan data perdagangan dari tahun 2019 hingga 2023. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka dan analisis isi, dengan langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian naratif, dan verifikasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adil dan inklusif, termasuk redistribusi fiskal dan partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, dapat memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan akses pasar global dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Kesimpulan utama adalah bahwa penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Penelitian merekomendasikan penajaman aspek redistribusi fiskal dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai pemerataan manfaat ekonomi.

Kata Kunci: *keadilan fiskal, kesetaraan, daya saing, kebijakan publik, perdagangan internasional.*

Abstract: This study aims to analyze aspects of fiscal justice and social equity within Indonesia's fiscal policy and its implications for national competitiveness in international trade. The research employs a qualitative approach with secondary data analysis sourced from official entities such as the Central Bureau of Statistics (BPS), relevant ministries, and academic literature from 2019 to 2023. Data collection methods include literature review and content analysis, with analysis steps comprising data reduction, narrative presentation, and source triangulation for validation. The findings reveal that fair and inclusive fiscal policies, including fiscal redistribution and local community participation in decision-making, can enhance national competitiveness by increasing access to global markets and reducing socio-economic disparities. The study concludes that applying principles of justice and transparency in fiscal policy can boost economic competitiveness while ensuring sustainable and equitable growth. Recommendations include strengthening fiscal redistribution mechanisms and increasing community involvement to promote equitable economic benefits for all groups. This research highlights that integrating social justice principles within fiscal policy is vital for maintaining a resilient and competitive economy in the face of global trade challenges.

Keywords: *fiscal justice, equity, competitiveness, public policy, international trade.*

PENDAHULUAN

Daya saing nasional yang sangat berpengaruh terhadap nilai tambah kekayaan nasional merupakan hal yang sangat krusial dalam pendekatan

perdagangan internasional makro ekonomi. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan kenaikan daya saing tercepat di wilayah Asia, hal ini didorong oleh kemudahan berusaha, kebijakan pemerintah, potensi sosial dan budaya.

Produktivitas dan efisiensi merupakan elemen penting yang menentukan tingkat daya saing suatu negara.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk dan sektor domestik di pasar global, kebijakan fiskal melakukan peran strategis melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk memberikan subsidi dan insentif fiskal (seperti *tax holiday*, *tax allowance*, atau pengembalian PPN) kepada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Hal ini membantu menurunkan biaya produksi, meningkatkan profitabilitas perusahaan ekspor dan menstimulasi daya saing harga di pasar internasional.

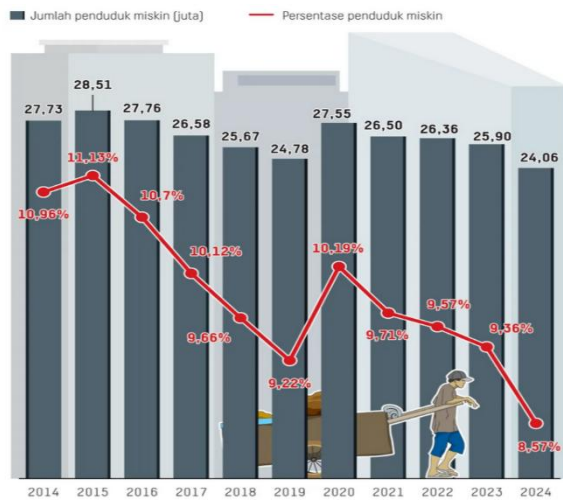
Kebijakan fiskal khususnya melalui instrumen belanja negara, subsidi ekspor, dan insentif pajak, memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi sektor ekspor-impor dan perdagangan internasional secara umum. Melalui berbagai instrumen seperti belanja negara, subsidi ekspor, dan insentif pajak, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan sektor ekspor.

Penelitian menunjukkan bahwa belanja negara yang meningkat dapat mendorong kegiatan ekonomi dengan reaksi positif terhadap pertumbuhan ekspor dan impor (Maheswaranathan & Jeewanthi, 2021; Ouakil et al., 2024). Misalnya, pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor strategis dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Selain itu, subsidi langsung untuk ekspor juga dapat mengurangi biaya produksi, membuat produk lebih kompetitif di pasar global (Igesa et al., 2018). Penelitian di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang terkoordinasi mampu memberikan manfaat

signifikan bagi sektor ekspor dan ekonomi secara keseluruhan (Amin et al., 2024).

Di sisi lain, insentif pajak juga berfungsi untuk meningkatkan investasi dan daya tarik bagi pelaku bisnis, yang selanjutnya berkontribusi terhadap pertumbuhan perdagangan internasional. Menurut penelitian di Sri Lanka dan beberapa negara lainnya, kebijakan pajak yang mendukung dapat meningkatkan aliran investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Hasanov et al., 2018; Maheswaranathan & Jeewanthi, 2021). Namun, perlu ada keseimbangan agar kebijakan tersebut tidak menghasilkan defisit fiskal yang berlebihan, yang dapat berisiko menstabilkan perekonomian secara keseluruhan (Flores-Sotelo et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung sektor ekspor-impor sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran serta menghindari utang publik yang tidak berkelanjutan. Kebijakan yang terkoordinasi dengan baik antara sektor fiskal dan moneter juga penting untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan perdagangan yang positif (Ugwu & Ehinomen, 2024).

Kebijakan fiskal guna meningkatkan daya saing nasional dalam perspektif perdagangan internasional makro ekonomi, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, namun juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesetaraan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam akses kebijakan fiskal di Indonesia sehingga mempengaruhi daya saing nasional yang ditujukan melalui tingkat kemiskinan Indonesia dari tahun ke tahun (lihat gambar 1).



Gambar 1. Data Ketimpangan akses kebijakan Fiskal yang ditunjukkan melalui tingkat kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 27,73 juta jiwa dengan persentase 10,96%. Angka ini sempat meningkat menjadi 28,51 juta jiwa (10,33%) pada tahun 2015, sebelum mengalami penurunan yang cukup konsisten dalam beberapa tahun berikutnya. Penurunan signifikan terjadi hingga tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 24,78 juta jiwa (9,22%). Namun, pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin menjadi 27,55 juta jiwa dan persentasenya naik menjadi 10,19%. Setelahnya, tren kembali menunjukkan penurunan hingga tahun 2024, di mana jumlah penduduk miskin menurun menjadi 24,06 juta jiwa dengan persentase 8,57%. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang cukup berhasil, meskipun sempat terganggu oleh krisis akibat pandemi.

Selain data kemiskinan, data peringkat daya saing Indonesia dari penting

dalam studi ini (lihat gambar 2). Berikut adalah data peringkat daya saing nasional Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) yang diterbitkan oleh World Economic Forum dari tahun 2007 hingga 2019 (Countryeconomy, 2019):

Tabel 1. Data Daya Saing Indonesia dari 2015-2019

Tahun	Peringkat	Skor CGI
2015	34	65,30
2016	37	64,60
2017	36	66,86
2018	45	64,94
2019	50	64,63

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Peringkat daya saing Indonesia menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut, dengan posisi terbaik pada tahun 2015 di peringkat 34. Skor GCI yang relatif stabil mencerminkan tantangan dan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing nasional. Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2020, World Economic Forum tidak lagi menerbitkan Global Competitiveness Index tahunan. Sebagai alternatif, IMD World Competitiveness Center menerbitkan World Competitiveness Ranking. Namun, data spesifik peringkat Indonesia dalam laporan tersebut tidak tersedia dalam hasil pencarian saat ini.

Teori Buchanan yang mengemukakan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang untuk memastikan distribusi sumber daya dan peluang yang

adil di antara berbagai wilayah dan kelompok sosial, sehingga mendorong kesetaraan sosial (Kuehn, 2021; Marciano, 2020), menjadi sangat penting dalam analisis daya saing internasional dalam perdagangan internasional makro ekonomi. Teori keadilan sosial dan kesetaraan dalam kebijakan fiskal memiliki beberapa indikator yang meliputi **transparansi, akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi, dan prosedur konstitusional** sebagai pilar utama keadilan dalam kebijakan fiskal (Buchanan & Wagner, 1977).

Penelitian mengenai analisis kebijakan fiskal dengan berlandaskan Teori Keadilan Sosial dan Kesetaraan menjadi semakin mendesak dalam konteks pengelolaan ekonomi saat ini, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi, dan prosedur konstitusional. Kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel dapat memastikan bahwa alokasi sumber daya publik dilakukan dengan tepat, sehingga meminimalkan korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Juanda & Heriwibowo, 2016; Sari et al., 2024). Selain itu, dalam menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi dan pandemi, penting untuk menerapkan kebijakan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan berbagai generasi agar tidak ada kelompok yang tertinggal (Nasution & Novalina, 2020; Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022). Prosedur konstitusional yang mapan juga sangat penting agar proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan fiskal berlangsung secara adil dan berdasarkan aspirasi masyarakat, yang pada gilirannya akan memfasilitasi pencapaian keadilan sosial (Akhmad et al., 2013; Jamil, 2020). Penelitian ini semakin relevan dalam konteks perkembangan dinamika perekonomian global dan nasional yang membutuhkan kajian mendalam untuk

menciptakan kebijakan fiskal yang tidak hanya stimulatif, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat (Meiyenti et al., 2023; Munawar, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kebijakan fiskal, seperti halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Liang et al., 2020 menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang adil dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin akses yang lebih baik terhadap sumber daya. Penelitian lain juga menunjukkan pengelolaan fiskal secara lokal yang setara dan adil berdampak pada perekonomian masyarakat yang stabil (Herdawati & Apriani, 2024). Pada tingkat lokal, penelitian lain juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana desa harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, agar tercipta keadilan dan akuntabilitas (Kurniawan et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distribusi yang diusulkan oleh Buchanan, yang menyerukan agar pemerintah menciptakan regulasi yang memfasilitasi partisipasi kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan, terutama terkait dengan sumber daya lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Liang et al., 2020).

Selanjutnya, kesetaraan akses terhadap pasar global juga menjadi bagian integral dari teori ini. Dalam konteks makroekonomi, akses yang adil terhadap pasar global dapat memperkuat daya saing nasional dengan meningkatkan kemampuan negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional. Menurut beberapa peneliti,

akses terhadap teknologi baru dan inovasi yang dihasilkan dari perdagangan internasional berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara (Boikova et al., 2021). Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong inovasi dan memastikan akses yang adil menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif (Boikova et al., 2021).

Dalam konteks pembuatan kebijakan publik, Buchanan menekankan bahwa pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa suara mereka diwakili, terutama bagi komunitas yang kurang terlayani dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam struktur ekonomi global (Liang et al., 2020; Wright & Merritt, 2020). Konsekuensi dari pendekatan yang inklusif ini adalah menciptakan sistem yang lebih adil di mana distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi dapat berlangsung secara lebih merata (Liang et al., 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan memastikan bahwa keuntungannya tidak hanya dirasakan oleh segelintir individu atau negara, tetapi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana aspek keadilan dan kesetaraan diterapkan dalam kebijakan fiskal di Indonesia sehingga daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional tidak hanya mementingkan aspek ekonomi namun juga dapat menjamin keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses kebijakan fiskal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk mengkaji aspek keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan fiskal di Indonesia sehingga berimplikasi pada daya saing nasional dalam perdagangan internasional ekonomi makro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif-eksploratif sebagaimana dikembangkan oleh Creswell (2007), dengan tujuan untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal Indonesia menerapkan keadilan dan kesetaraan sehingga Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan internasional dengan memperhatikan ekonomi dan menjamin keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses kebijakan fiskal. Kajian ini dilandasi oleh pendekatan teori Teori keadilan sosial dan kesetaraan dalam kebijakan fiskal memiliki beberapa indikator yang meliputi **transparansi, akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi, dan prosedur konstitusional** sebagai pilar utama keadilan dalam kebijakan fiskal (Buchanan & Wagner, 1977).

Pengumpulan data dilaksanakan sejak tanggal 26 Maret 2025 hingga 9 April 2025 dari berbagai sumber, diantaranya adalah <https://www.bps.go.id/id>, <https://www.scopus.com/sources.uri>, <https://scholar.google.com/>, Website resmi pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut (lihat gambar 2).



Gambar 2. Langkah-langkah Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti (2025).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses reduksi data dilakukan secara sistematis sejak tahap awal pengumpulan data, dengan menyaring informasi berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian, yakni bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal Indonesia menerapkan keadilan dan kesetaraan sehingga Indonesia dapat bersaing dalam perdagangan internasional dengan memperhatikan ekonomi dan menjamin keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses kebijakan fiskal. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi kontekstual untuk mempermudah identifikasi pola-pola hubungan antarkategori. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara berkelanjutan dan verifikasi melalui *triangulasi sumber* guna menjamin validitas serta konsistensi interpretasi temuan. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai aspek kesetaraan dan keadilan dalam permasalahan fiskal pada persepektif daya saing nasional melalui perdagangan internasional makro ekonomi dapat dilihat melalui kasus ekspor bijih nikel mentah pada tahun 2020. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah ekspor nasional dan memperkuat daya saing industri berbasis sumber daya alam. Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan secara makro: nilai ekspor produk nikel meningkat tajam—misalnya, dari USD 6,24 miliar (2020) menjadi lebih dari USD 30 miliar (2022) (sumber: Kemendag & BPS).

Dari sisi pendekatan makroekonomi, langkah ini memperkuat neraca berjalan, meningkatkan cadangan devisa, dan menarik Foreign Direct Investment (FDI), terutama dari Tiongkok.

Namun, dalam perspektif James Buchanan, terdapat masalah fundamental terkait keadilan distribusi dan kesetaraan akses terhadap hasil perdagangan. Berdasarkan Teori Buchanan analisis pada studi ini dibagi kedalam beberapa aspek meliputi transparansi, akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi, dan prosedur konstitusional.

Aspek Transparansi dan Akuntabilitas dalam permasalahan fiskal berdasarkan perspektif daya saing melalui perdagangan internasional makro ekonomi

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskal memainkan peran kunci dalam mendorong daya saing sebuah negara melalui perdagangan internasional, terutama dalam kerangka teori yang diajukan oleh James Buchanan. Menurut Buchanan, kejelasan dalam kebijakan fiskal penting untuk menginformasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka (Johnson, 2022). Transparansi dalam anggaran pemerintah dan penggunaan dana publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap iklim investasi dan daya saing. Dalam konteks perdagangan internasional, negara yang memiliki sistem fiskal yang transparan cenderung menarik lebih banyak investasi asing, karena investor internasional mencari lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk operasi bisnis mereka (Adeosun et al., 2021).

Akuntabilitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan publik, juga sangat

penting. Jika kebijakan fiskal dijalankan dengan akuntabilitas yang tinggi, maka akan membangun reputasi yang baik di mata investor dan mitra dagang, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam diskusi kebijakan. Selain itu, pengawasan yang kuat terhadap penggunaan anggaran akan membantu memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif, menghindari pemborosan dan korupsi, yang bisa menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka konstitutif yang kuat dapat mengatur dan membatasi tindakan pemerintah dalam pengelolaan fiskal, mengurangi risiko perilaku oportunistik yang dapat merusak daya saing negara di arena global. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan fiskal tidak hanya mendukung keadilan sosial menurut teori Buchanan, tetapi juga merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing makroekonomi suatu negara dalam konteks perdagangan internasional (Johnson, 2022). Kebijakan yang berlandaskan pada prinsip ini akan memungkinkan negara untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan, sekaligus menjamin kesejahteraan bagi seluruh generasi yang akan datang.

Pada permasalahan aspek transparansi terletak pada permasalahan data ekspor bijih nikel Indonesia dan impor Tiongkok. Meskipun Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah mulai Januari 2020, data dari General Administration of Customs of China (GACC) menunjukkan bahwa Tiongkok masih mengimpor bijih nikel dari Indonesia. Antara Januari 2020 hingga Mei 2023, tercatat impor sebesar 5,56 juta metrik ton bijih nikel dari Indonesia ke

Tiongkok (Reuters, 2023).

Disisi lain, permasalahan mengenai transparansi juga terletak pada data ekspor bijih nikel. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tidak mencatat adanya ekspor bijih nikel (HS 2604) selama periode tersebut, namun GACC melaporkan impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia senilai US\$193,6 juta pada tahun 2020 (Pebri, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, Analisis Transparansi Berdasarkan Teori James M. Buchanan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan fiskal. Perbedaan data antara BPS dan GACC, serta laporan ekspor ilegal bijih nikel, menunjukkan adanya tantangan dalam transparansi pelaksanaan kebijakan larangan ekspor. Kurangnya transparansi ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan reputasi Indonesia dalam perdagangan internasional, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing nasional.

Transparansi fiskal sangat penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global dengan mendorong lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat diprediksi. Kebijakan fiskal yang transparan memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan kejelasan data keuangan, yang sangat penting untuk evaluasi yang tepat atas status keuangan suatu negara baik oleh para pemilih maupun pasar keuangan (Eker, 2020). Transparansi ini mengurangi ketidakpastian mengenai kebijakan fiskal dan hasilnya, yang mengarah pada penilaian pasar yang lebih baik terhadap risiko pemerintah dan peningkatan peringkat kredit, yang sangat penting untuk menarik investasi asing (Arbatli & Escolano, 2015).

Kebijakan perdagangan yang transparan juga mendorong akses pasar, mengurangi biaya perdagangan, dan mendorong kerja sama, yang sangat penting untuk pertumbuhan perdagangan dan

pembangunan ekonomi. Selain itu, transparansi fiskal dapat menarik investasi asing langsung (FDI) dengan menyediakan lingkungan yang dapat diprediksi dan dapat dipercaya bagi para investor. Negara-negara dengan tingkat keterbukaan anggaran yang lebih tinggi cenderung menarik lebih banyak aliran masuk FDI, karena transparansi selama pelaksanaan anggaran dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan investor. Hal ini didukung lebih lanjut oleh fakta bahwa kebijakan ekonomi yang transparan dianggap sebagai faktor kunci dalam keputusan bisnis, yang mempengaruhi pendirian perusahaan asing di wilayah tertentu (Mabillard & Vuignier, 2021).

Transparansi fiskal mendukung daya saing dalam perdagangan internasional dengan mengurangi ketidakpastian, meningkatkan penilaian pasar, mempromosikan kemudahan berbisnis, dan menarik investasi asing. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing di pasar global.

Aspek Kesenjangan antar-generasi dalam permasalahan fiskal berdasarkan perspektif daya saing melalui perdagangan internasional makro ekonomi

Analisis aspek kesetaraan dalam kebijakan fiskal, berdasarkan perspektif James M. Buchanan, menekankan pentingnya distribusi yang adil dari beban dan manfaat kebijakan publik. Aspek kesetaraan antar-generasi dalam konteks permasalahan fiskal sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama dari perspektif daya saing dalam perdagangan internasional, sebagaimana diuraikan dalam teori intergenerational equity. Teori ini menekankan penciptaan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan generasi saat

ini, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap generasi yang akan datang (Bessant et al., 2011; Thompson, 2005). Kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan dapat menciptakan kondisi yang mendukung daya saing negara di pasar global, dengan memperkuat investasi dalam infrastruktur dan pendidikan yang diperlukan bagi pengembangan sumber daya manusia (Aidhi et al., 2023).

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya antar-generasi dapat mengakibatkan generasi mendatang menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial yang lebih besar, yang pada akhirnya mengurangi daya saing sebuah negara dalam konteks perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan antar-generasi perlu diterapkan untuk menghindari ketimpangan yang dapat merugikan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Misalnya, investasi dalam inovasi dan teknologi yang berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing produk di pasar internasional, serta memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang (Aidhi et al., 2023; Shi et al., 2022). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang adil dapat menghargai kontribusi semua generasi, memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan berkelanjutan di masa depan (Rahmah & Ibrahim, 2023; Thompson, 2005). Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya memprioritaskan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mengintegrasikan visi yang lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, sekaligus mendorong daya saing yang lebih tinggi dalam perdagangan internasional.

Kasus larangan ekspor bijih nikel mentah oleh Indonesia pada tahun 2020

memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kesetaraan ekonomi domestik dan daya saing nasional dalam perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah mulai Januari 2020 dengan tujuan mendorong pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat industri domestik dan meningkatkan penerimaan negara. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, ketimpangan tetap menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah pedesaan. Ekspansi industri nikel menyebabkan deforestasi dan polusi, yang berdampak negatif pada komunitas lokal dan mata pencaharian mereka. Banyak daerah penghasil nikel seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara masih mengalami kemiskinan tinggi dan ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar. Manfaat ekonomi dari ekspor nikel lebih banyak terpusat di elite industri dan pemerintah pusat, sementara masyarakat lokal menghadapi dampak eksternalitas seperti kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak.

Pemerataan dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Kebijakan fiskal yang adil memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara adil, yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini, pada gilirannya, mendukung tenaga kerja yang stabil dan produktif, yang sangat penting untuk menjaga daya saing dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, kebijakan yang meningkatkan iklim investasi dengan meningkatkan kualitas peraturan, efisiensi bea cukai, infrastruktur,

dan akses keuangan dapat secara signifikan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional (Şeker, 2017).

Dengan berfokus pada kesejahteraan global dan kebijakan yang meningkatkan konvergensi dapat memastikan bahwa manfaat dari perdagangan internasional didistribusikan secara lebih merata, mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi dan mendorong daya saing jangka panjang. Oleh karena itu, mengintegrasikan kesetaraan ke dalam kebijakan fiskal bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga merupakan pendekatan strategis untuk meningkatkan daya saing suatu negara dalam ekonomi global.

Aspek Prosedur konstitusional dalam permasalahan fiskal berdasarkan perspektif daya saing melalui perdagangan internasional makro ekonomi

Analisis mengenai prosedur konstitusional dalam kebijakan fiskal, berdasarkan teori James M. Buchanan, menyoroti pentingnya penetapan aturan dasar yang mengatur proses pengambilan keputusan fiskal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Aspek prosedur konstitusional dalam permasalahan fiskal memiliki signifikansi yang sangat penting dalam konteks daya saing melalui perdagangan internasional, khususnya ketika dikaitkan dengan pendekatan Teori Keadilan Sosial Buchanan. Teori ini menekankan pentingnya bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan dan diimplementasikan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat membantu menciptakan kondisi yang adil bagi semua pihak terkait dalam sistem perdagangan internasional (Aini, 2019). Dalam praktiknya, prosedur konstitusional memperkuat daya saing sebuah negara dengan memastikan bahwa semua

keputusan fiskal diambil melalui mekanisme yang legitimate dan partisipatif, sehingga mencerminkan aspirasi masyarakat dan berupaya mengurangi ketimpangan yang ada (Wahyudi, 2021).

Kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prosedur konstitusi yang baik dapat menghasilkan sumber daya yang diinvestasikan dalam infrastruktur dan inovasi, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Hal ini memungkinkan negara untuk berpartisipasi lebih baik dalam perdagangan internasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Misalnya, kebijakan yang mendorong investasi dalam sektor teknologi dan manufaktur akan menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing secara internasional, dan ini juga membutuhkan dukungan dari kebijakan fiskal yang bijaksana dan prosedur konstitusional yang kuat (Syafira et al., 2023). Oleh karena itu, perhatian pada aspek prosedur konstitusional dalam kebijakan fiskal bukan hanya berfungsi untuk memenuhi narasi keadilan sosial, tetapi juga untuk membangun daya saing makroekonomi yang relevan dalam konteks perdagangan internasional (Suryadarma & Faqih, 2023).

Dalam konteks larangan ekspor bijih nikel mentah oleh Indonesia pada tahun 2020, evaluasi terhadap prosedur konstitusional yang diterapkan dalam perumusan dan implementasi kebijakan tersebut menjadi krusial, terutama dalam kaitannya dengan daya saing nasional dalam perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari rencana semula tahun 2022 menjadi Januari 2020, dengan tujuan mendorong pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk nikel. Percepatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh

mana prosedur konstitusional, seperti konsultasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan, telah dilaksanakan secara memadai. Selain itu, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada November 2019, menuduh bahwa larangan ekspor dan persyaratan pengolahan domestik Indonesia melanggar Pasal XI:1 dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Pada November 2022, WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Keputusan ini menunjukkan potensi ketidaksesuaian antara kebijakan domestik Indonesia dengan komitmen internasionalnya, yang seharusnya dipertimbangkan dalam prosedur konstitusional (WTO, 2025).

Kebijakan ini memberikan dampak signifikan bagi daya saing nasional dalam perdagangan internasional, Indonesia mengalami lonjakan ekspor produk turunan nikel. Pada Januari-Agustus 2022, nilai ekspor produk turunan nikel mencapai US\$12,35 miliar, meningkat 263% dibanding periode yang sama pada 2019. Indonesia menjadi produsen utama nikel olahan, menyumbang 60% dari produksi global, yang memperkuat posisi negara dalam rantai pasok industri kendaraan listrik (Financial Times, 2025).

Namun Indonesia mendapatkan tantangan hukum internasional yaitu Keputusan WTO yang menentang kebijakan Indonesia dapat mempengaruhi reputasi dan hubungan perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama, terutama Uni Eropa.

Aspek prosedur konstitusional dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk mendukung daya saing melalui perdagangan internasional secara makro. Kerangka kerja konstitusional yang didefinisikan dengan baik memastikan bahwa kebijakan perdagangan transparan, non-diskriminatif, dan berbasis aturan, yang sangat penting untuk menghilangkan distorsi pasar dan hambatan untuk masuk ke pasar (Qaqaya, 2020).

Kerangka kerja ini membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk perdagangan internasional, yang sangat penting untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan mendorong efisiensi dan kesejahteraan ekonomi (Weiss, 2020).

Selain itu, prosedur konstitusional memberikan pendekatan terstruktur untuk pembuatan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan perdagangan selaras dengan tujuan ekonomi yang lebih luas dan komitmen internasional. Oleh karena itu, aspek prosedur konstitusional dalam kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing perdagangan internasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesetaraan sosial merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing nasional Indonesia di kancah perdagangan internasional. Kebijakan fiskal yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas dapat memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan mengimplementasikan redistribusi sumber daya yang proporsional, pemerintah dapat meminimalisir ketimpangan serta memberikan manfaat ekonomi yang merata. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal bukan hanya sekadar masalah moral, tetapi juga merupakan strategi efektif untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan di tingkat global.

Kebijakan yang menitikberatkan pada redistribusi fiskal dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan tidak hanya memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan

masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan fiskal membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan kompetitif, mendukung kepercayaan investor asing, dan meminimalisasi risiko ketidakadilan sosial.

Keberhasilan dalam menjaga prosedur konstitusional dan mematuhi regulasi internasional menjadi penopang utama agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan hambatan di hadapan perjanjian perdagangan internasional, seperti WTO. Penguatan kerangka hukum dan mekanisme partisipatif di tingkat nasional turut berkontribusi terhadap terciptanya iklim perdagangan yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keseimbangan antara keadilan sosial dan daya saing ekonomi merupakan fondasi strategis yang harus terus dikembangkan agar Indonesia mampu bersaing secara efektif di pasar global sekaligus menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan redistribusi fiskal afirmatif kepada daerah penghasil sumber daya melalui skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang proporsional dan transparan. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor komoditas—seperti nikel, batu bara, atau kelapa sawit—tidak hanya memperkaya pusat atau pelaku industri besar, tetapi juga memperkuat basis ekonomi lokal dan menurunkan ketimpangan fiskal antarwilayah. Selain itu, penguatan keterlibatan lokal dalam proses pengambilan keputusan—terutama terkait proyek hilirisasi dan kebijakan perdagangan menjadi krusial. Hal ini selaras dengan pandangan Buchanan bahwa kebijakan ekonomi seharusnya lahir dari mekanisme deliberatif yang menjamin keterwakilan dan

partisipasi semua pihak yang terdampak. Partisipasi lokal dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola dampak perdagangan global. Untuk menciptakan ekosistem ekspor yang inklusif, perlu dilakukan perluasan akses UMKM lokal terhadap rantai pasok industri ekspor, melalui dukungan pelatihan teknis, pemberian insentif fiskal, serta perluasan akses terhadap kredit mikro. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas pelaku usaha lokal, tetapi juga membuka jalur bagi mereka untuk ikut bersaing di pasar global secara lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan semangat keadilan dalam teori ekonomi konstitusional Buchanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Universitas Padjadjaran, Indonesia, yang telah mendukung penelitian ini hingga siap untuk dipublikasikan

DAFTAR PUSTAKA

- Adeosun, O. A., Ayodele, O. S., & Jongbo, O. C. (2021). Policy asymmetries and fiscal sustainability: evidence from Nigeria. *African Journal of Economic and Management Studies*, 12(2), 302–320. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-08-2020-0389>
- Aidhi, A. Al, Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- Akhmad, A., Achsani, N. A., Tambunan, M., & Mulyo, S. A. (2013). PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *AGRIBUSINESS JOURNAL*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.15408/aj.v7i1.5167>
- Amin, S., Aqeel Baig, M., & Lal, I. (2024). Accessing the Role of Macroeconomic Policies on Export and Growth Relationship- A Case of India and Pakistan. *Journal of Finance & Economics Research*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.20547/jfer2409201>
- Arbatli, E., & Escolano, J. (2015). Fiscal Transparency, Fiscal Performance and Credit Ratings. *Fiscal Studies*, 36(2), 237–270. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12051>
- Bessant, J. C., Emslie, M., & Watts, R. (2011). Accounting for Future Generations: Intergenerational Equity in Australia ¹. *Australian Journal of Public Administration*, 70(2), 143–155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2011.00723.x>
- Boikova, T., Zeverte-Rivza, S., Rivza, P., & Rivza, B. (2021). The Determinants and Effects of Competitiveness: The Role of Digitalization in the European Economies. *Sustainability*, 13(21), 11689. <https://doi.org/10.3390/su132111689>

- Buchanan, J. M., & Wagner, R. E. (1977). *Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes*. Academic Press.
- Countryeconomy. (2019). *Indonesia-Global Competitiveness Index*.
- Eker, A. Y. (2020). *Fiscal Transparency in Turkey: Lessons Learned from International Evaluations* (pp. 195–212). https://doi.org/10.1007/978-981-15-1914-7_11
- Financial Times. (2025). *Transcript: China pumps the brakes on Tesla's autonomous cars*. Financial Times.
- Flores-Sotelo, W. S., Pongo-Águila, O., Rivas-Peña, C. A., & Chávez-Díaz, J. M. (2024). An analysis of fiscal management and macroeconomic stability: An econometric study of public policies in Latin American countries. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 6547. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6547>
- Hasanov, F., Mammadov, F., & Al-Musehel, N. (2018). The Effects of Fiscal Policy on Non-Oil Economic Growth. *Economies*, 6(2), 27. <https://doi.org/10.3390/economies6020027>
- Herdawati, & Apriani, F. (2024). KESESUAIAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA TANJUNG PREPAT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 190/PMK.07 TAHUN 2021 SUITABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN HANDLING COVID-10 IN TANJUNG PREPAT VILLAGE WITH REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC INDONESIA NUMBER 190/PMK.07 OF 2021. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(3), 230–242. <https://doi.org/10.46730/jiana.v20i2>
- Igesa, B. S., Okiyama, M., & Tokunaga, S. (2018). Impacts of Tariff Reduction and Mixed Fiscal Policy on the Kenyan Agricultural and Food Industry: Using the Macro CGE Model. *Japanese Journal of Agricultural Economics*, 20(0), 51–56. https://doi.org/10.18480/jjae.20.0_51
- Jamil, H. (2020). *Implikasi Kebijakan Fiskal Era Orde Baru Dan Era Reformasi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif Di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ks5at>
- Johnson, M. (2022). James M. Buchanan and the Soul of Classical Political Economy. *Journal of Public Finance and Public Choice*, 37(2), 260–274. <https://doi.org/10.1332/251569121X16485448210771>
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). KONSOLIDASI DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI KEBIJAKAN BELANJA DAERAH BERKUALITAS. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 15. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.419>
- Kuehn, D. (2021). Australian Federalism in James Buchanan's Early Work on Fiscal Equity. *History of Economics Review*, 79(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/10370196.2021.1939293>

- Kurniawan, H., Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2021). ANALISI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA NGAL KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018. ANALYSIS OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT IN NGAL VILLAGE, UNGAR DISTRICT, KARIMUN DISTRICT IN 2018. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 21–33.
- Liang, J., Park, S., & Zhao, T. (2020). Representative Bureaucracy, Distributional Equity, and Environmental Justice. *Public Administration Review*, 80(3), 402–414. <https://doi.org/10.1111/puar.13160>
- Mabillard, V., & Vuignier, R. (2021). Exploring the relationship between transparency, attractiveness factors, and the location of foreign companies: what matters most? *Place Branding and Public Diplomacy*, 17(4), 304–316. <https://doi.org/10.1057/s41254-020-00171-6>
- Maheswaranathan, S., & Jeewanthi, K. M. N. (2021). Empirical Investigation of the Influence of Fiscal Policy on Sri Lankas Economic Growth from 1990 to 2019. *Asian Journal of Economic Modelling*, 9(2), 122–131. <https://doi.org/10.18488/journal.8.2021.92.122.131>
- Marciano, A. (2020). The origins of Buchanan's views on federalism, Chicago 1946–1947. *Journal of Institutional Economics*, 16(3), 319–335. <https://doi.org/10.1017/S1744137419000742>
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186–195. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.503>
- Munawar, Y. (2021). RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS BISNIS: STUDI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Bina Ekonomi*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.4344.1-13>
- Nasution, L. N., & Novalina, A. (2020). Pengendalian Inflasi di Indonesia Berbasis Kebijakan Fiskal dengan Model seemingly Unrelated Regression. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(1), 47–54. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v20i1.4306>
- Ouakil, H., Moustabchir, A., Lechheb, H., & EL Ouazzani, H. (2024). Fiscal policy in the face of the health crisis: A simulation using a hybrid DSGE-SIR model. *African Development Review*, 36(3), 425–443. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12773>
- Pebri. (2023, July 8). *Indonesia's Illegal Nickel Export A Natural Resources Curse?* Independent Observer.
- Qaqaya, H. (2020). Complementarities and tensions between competition and trade law and policy. In *Research Handbook on Methods and Models of Competition Law*. Edward Elgar Publishing.

- <https://doi.org/10.4337/9781785368653.00035>
- Rahmah, M., & Ibrahim, H. (2023). Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 412–2417.
<https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13281>
- Reuters. (2023, July 7). *Indonesia probes possible illegal nickel ore exports to China*. Reuters.
- Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesenambungan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 20–29.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706>
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
<https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Şeker, M. (2017). Trade Policies, Investment Climate, and Export Performance. *Bogazici Journal*, 31(2).
<https://doi.org/10.21773/boun.31.2.2>
- Shi, C., Wu, Y., & Chen, M. (2022). Study on the Long-term Mechanism of “Ten-Year Fishing Ban” In The Middle and Lower Reaches of the Yangtze River from The Perspective of Intergenerational Equity. *Frontiers in Business, Economics and Management*, 7(1), 37–41.
<https://doi.org/10.54097/fbem.v7i1.3692>
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2023). Ekspor Nikel Indonesia Pasca Gugatan Oleh Uni Eropa Ditinjau Dari Teori Potensi Keunggulan Komparatif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 261–268.
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.225>
- Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1125–1135.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>
- Thompson, J. (2005). Intergenerational Equity in an Ageing Society. *Agenda - A Journal of Policy Analysis and Reform*, 12(1).
<https://doi.org/10.22459/AG.12.01.2005.06>
- Ugwu, E., & Ehinomen, C. (2024). Macroeconomic Policy Coordination and Economic Growth Uncertainty in West Africa. *Folia Oeconomica Stetinensia*, 24(1), 203–226.
<https://doi.org/10.2478/fofi-2024-0012>
- Wahyudi, A. (2021). PENINGKATAN DAYA SAING USAHA PERKEBUNAN TEBU RAKYAT DI JAWA: TANTANGAN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN / Improving the Competitiveness of Sugarcane Farming in Java: Challenges from Policy Perspectives.

Perspektif, 20(1), 35.

<https://doi.org/10.21082/psp.v20n1.2021.35-49>

Weiss, F. (2020). *Quest for a Sustainable International Investment Regime: Leveling Up Through Competition (Policy) Rules?* (pp. 1–24). https://doi.org/10.1007/978-3-030-33916-6_1

Wright, J. E., & Merritt, C. C. (2020). Social Equity and

<scp>COVID</scp> -19: The Case of African Americans. *Public Administration Review*, 80(5), 820–826.

<https://doi.org/10.1111/puar.13251>

WTO. (2025, April 8). *China initiates WTO dispute regarding US “reciprocal tariffs.”* World Trade Organization.